

Gerakan Sosial Politik Omah Tani di Kabupaten Batang

Rizca Yunike*

ABSTRAK

Runtuhnya rezim Orde Baru menjadi sebuah titik tolak bagi kebangkitan gerakan organisasi rakyat di berbagai sektor seperti buruh, petani dan nelayan yang selama ini diam. Adanya keterbukaan dan minimnya tindakan represif pada petani di era reformasi semakin memberi peluang bagi mereka untuk melakukan gerakan yang bersifat sosial politik. Gerakan petani di Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. Diawali dengan masalah kelangkaan dan konflik ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia khususnya petani yang memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah kolektif bernama Omah Tani, para petani di Kabupaten Batang berusaha mengambil kembali hak atas tanah mereka yang telah diakusisi oleh negara selama masa Orde Baru. Gerakan sosial yang awalnya sebatas aksi reklamasi dan aksi massa berkembang menjadi gerakan politik formal untuk menguasai jabatan-jabatan publik dan strategis baik itu eksekutif (mulai di tingkat pemerintahan desa hingga kabupaten) dan legislatif (DPRD Kabupaten Batang) untuk memperlancar gerakan mereka. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Omah Tani. Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Omah Tani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu pola gerak, pencapaian dan implikasi gerakan yang dilakukan dalam batasan tahun

2007 hingga tahun 2011. Kesimpulan yang dapat diperoleh, gerakan petani bukan lagi diakibatkan hubungan eksploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan tidak hanya diam seperti gaya petani asia tenggara dan masuk dalam struktur politik.

Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, gerakan petani, Omah Tani

ABSTRACT

The collapse of the new regime became a starting point for a revival movement of people's organization in various sectors such as labor, peasants, and fisherman who have been silent. The presence of openness and the lack of repressive act on peasant in the reformation era gave more chance for them to do a social political movement.

The movement of peasant in Batang is one of the cases appeared in the reformation era. Beginning with the problem of scarcity and limited land

availability conflicts in number disproportionate to the needs of human beings, especially peasants who have the assumption that land has a meaning as a source of economy peasants. Through collective container named Omah Tani, the peasants in the district of Batang trying to take back their land that have been acquired by the state during the new order era. Originally, the social movement was reclaiming and mass action and volved in to a formal political movement to control the public offices and strategic, executive (from village to district level government) and legislative (local representative of Batang) to facilitate their movement.

Through a qualitative approach with interviews and documentation as an effort to collect data and take the subject of socio-political movement undertaken by Omah Tani. This research describes socio movement politics conducted by Omah Tani. Focusing on three major problems, namely the motion pattern, achievement and implications of movement conducted within the 2007 to 2011. The conclusion that can be obtained, the movement caused by peasants no longer exploitative relation but also because of the openness of the system that provides opportunities to peasants to do the movement, not only silents as a style of peasant in southeast asia and entered into political structure.

Key words: land conflict, social-politic movement, peasant movement, Omah Tani

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik, FISIP, Unair, Email: putri.rizca@gmail.com

PENDAHULUAN

Mayoritas di berbagai tempat, tanah memiliki nilai tersendiri. Tanah merupakan aset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain akibat penjajahan serta banyaknya konflik pertanahan yang timbul di dalam negeri akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik dari negara yang bersangkutan.

Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Inilah yang memicu timbulnya konflik pertanahan. Di Indonesia, sengketa pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat

tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Permasalahan petani dan tanah memang menjadi salah satu hal yang penting di negara agraris seperti di Indonesia. Namun sejak masa kekuasaan Hindia-Belanda hingga sekarang, penguasaan terhadap tanah menjadi hal yang biasa terjadi. Sejak masa *cultural-stelsel*, politik etis, revolusi hijau, masa Orde baru hingga reformasi kekuasaan pengusaha pertanian sepertinya tidak ada habis-habisnya menguasai petani sekaligus penduduk lokal. Jika hal seperti ini terjadi, keadilan yang tepat adalah milik penguasa tanah di ujung kejayaan dan petani hanya buruh pekerja semata yang hanya berhak menggarap tanah.

Di Indonesia yang cenderung petaninya masih menggunakan nilai dan tatanan tradisional. Gerakan petani tradisional masih percaya pada strategi gerakan langsung dengan menghimpun jumlah massa yang besar untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendudukan lahan-lahan besar milik perusahaan multinasional, penutupan jalan raya, demonstrasi besar-besaran,

pengambilalihan kantor-kantor perusahaan maupun pemerintah merupakan beberapa contoh strategi langsung ini. Strategi ini memang relatif efektif dalam mencapai tujuan, tapi juga sangat riskan karena akan cenderung menonjol sifat anarkhisnya dan berpotensi mengurangi simpati dari berbagai pihak.

Namun ternyata pernyataan tersebut bisa dibantah oleh Omah Tani. Substansi masalah yang terjadi di Kabupaten Batang hingga menimbulkan sebuah gerakan yang dilakukan petani tentunya adalah permasalahan tanah. Aksi penguasaan lahan kembali oleh petani yang terjadi di wilayah kabupaten Batang dan Pekalongan dimana di koordinir oleh organisasi orientasinya memobilisasi petani untuk menguasai lagi lahan pertaniannya. Gerak-geraknya yaitu dengan cara memasukkan kadernya dalam struktural kelembagaan dan mobilisasi massa (petani). Dengan melakukan gerakan politik, mereka meyakini mampu meraih kesempatan dan hak yang harusnya dimiliki oleh para petani di Kabupaten Batang.

Pertanian di Kabupaten Batang ini merupakan wilayah lahan subur dan merupakan lahan pertanian sekaligus perkebunan yang sangat potensial sekali. Sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang ini, pemaksimalan potensi lahan

pertanian dan perkebunan di Batang dengan cara memberikan pengelolaannya pada perusahaan swasta maupun pemerintah (BUMN) dilakukan. Permasalahan ini melatarbelakangi munculnya berbagai organisasi tani lokal di beberapa desa di kabupaten Batang untuk melakukan perebutan lahan kembali yang harusnya adalah hak para petani. Hingga akhirnya muncul Omah Tani sebagai organisasi besar yang – bisa dikatakan – mewadahi semua gerakan Organisasi Tani Lokal (OTL) di desa-desa di kabupaten Batang.

Dan lahan yang digarap oleh petani di Batang adalah lahan yang sudah tidak terurus oleh perusahaan yang mulanya menyewa lahan. Kasus ini terjadi di kecamatan Blado dan Bandar dengan perusahaan Trakat yang izin usahanya adalah menanam dan mengolah tanaman randu untuk memproduksi kapook. Selain kasus menggarap lahan tak bertuan, di desa Pagilaran yang merupakan perkebunan teh milik UGM lain lagi permasalahannya. Di desa Pagilaran yang semua warganya adalah

penduduk asli desa tapi tidak memiliki lahan baik itu sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam karena lahan yang mereka miliki sudah diklaim oleh perkebunan saat masa awal pemerintahan Orde Baru. Namun di kecamatan Wonotunggal beda lagi permasalahannya. Di kecamatan ini konflik justru terjadi antara pihak perhutani yang mengklaim lahan warga sebagai milik perhutani dan melarang aktivitas pertanian warga yang menggunakan lahan tersebut. Hal ini dikarenakan batas yang tidak jelas antara lahan yang boleh digunakan sebagai aktivitas pertanian warga dan lahan perhutani.

Awalnya para petani ini bersama FPPB merasa cukup melakukan gerakan yang fisiknya seperti demonstrasi dan melalui hukum saja. Namun sekitar tahun

2008, gerakan mereka tidak hanya lagi gerakan yang sifatnya sosial saja, tapi semakin merambah ke arah politik. Dengan mengisi pos-pos strategis yang sifatnya struktural. Ditandai dengan menempatkan para kader mereka untuk mengisi jabatan sebagai lurah dan kepala desa di 9 wilayah antara lain di kecamatan Bandar, Blado dan Banyu Putih. Ketika pemilu legislatif pada 2009 berhasil memasukkan satu kader mereka di DPRD kabupaten Batang. Dan saat pemilihan umum daerah (pemilukada) untuk memilih Bupati masa bakti 2012-

2017, Omah Tani sukses mendukung calon mereka yaitu Pak Yoyok hingga menjadi Bupati Kabupaten Batang saat ini.

Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implikasi gerakan sosial yang dilakukan oleh Omah Tani? Lalu bagaimana bentuk gerakan yang dilakukan Omah Tani sebagai sebuah induk organisasi tani lokal (OTL) di sana hingga mampu mengkoordinir organisasi tani lokal yang ada di sana? Dan sudah sejauh manakah gerakan mereka aktual saat ini?

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif untuk mendapatkan makna di balik data-data yang tersaji. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi

kader Omah Tani.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang gerakan sosial politik Omah Tani sebagai organisasi petani berbasis gerakan di Jawa Tengah. Dimana pergerakan petani dalam Omah Tani di Kabupaten Batang diawali dengan permasalahan tanah namun gerakan yang dilakukan tidak lagi hanya sebatas aksi massa tapi sudah melalui jalur strategis pemerintahan mulai tataran desa hingga kabupaten. Fokus utama dari penelitian ini tentunya adalah gerakan sosial politik dan perkembangan yang sudah dicapai.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Gedong Pendhem yang merupakan sekretariat Omah Tani yang berlokasi di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Subyek dan Unit Penelitian

Subyek penulisan dalam penelitian ini adalah gerakan sosial politik yang dilakukan oleh petani. Dimana unit penelitiannya adalah Omah Tani sebagai organisasi petani di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menjadi pengamat kegiatan dan juga sebagai pengumpul data penelitian serta memilih dan menggunakan alat penelitian seperti wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti memperoleh data tambahan dengan cara mengumpulkan dokumen, dan data-data terkait dengan kegiatan penelitian.

Pihak yang menjadi informan serta diwawancarai dalam penelitian ini merupakan anggota-anggota dari organisasi Omah Tani yang dianggap paling mengetahui dan menguasai organisasi tersebut. Alasannya adalah karena para anggota merupakan pengurus yang secara aktif dan lebih mengetahui seluk beluk dari permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam Omah Tani di kesehariannya.

Data yang dihasilkan dari wawancara terkadang tidak cukup, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi atau artefak untuk melengkapi data penelitian. Teknik studi dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data

non-insani, misalnya buku pedoman, catatan, surat-surat keputusan, laporan kegiatan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil dari dokumentasi kegiatan yang pernah dilakukan oleh Omah Tani yang bersumber dari media masa surat kabar lokal dan nasional.

Teknik Analisis Data

Langkah analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain yang dihimpun untuk memperoleh deskripsi secara utuh tentang gerakan sosial dan politik yang dilakukan oleh Omah Tani. Analisis data dalam laporan penelitian ini disusun pembahasannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe Gerakan Petani dalam Scottian dan POS Tarrow

Dalam gerakan sosial politik yang dilakukan oleh petani, banyak rujukan mengatakan pemikiran James Scott dalam Moral Ekonomi Petani dan Senjata

Kaum Tertindas menjadi salah satu referensi khusus dalam mengamati gerakan yang dilakukan petani terutama di Asia Tenggara. Bagi James Scott, faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu gerakan khususnya perlawanan petani adalah adanya hubungan yang eksploitatif, yang mengakibatkan kondisi ekonomi petani lemah. Hubungan yang demikian dianggap sebagai sumber konflik yang memungkinkan timbulnya gerakan pemberontakan petani, terutama jika apabila hubungan yang demikian mencapai taraf tertentu, atau yang disebutnya sebagai kondisi '*kerawanan struktural petani*' yang melibatkan ekologi, sistem harga dan monokultur yang jika kondisi tersebut melebihi batas kekuatan subsistensi maka sangat memungkinkan bagi gerakan petani.

Dalam konteks struktural, Scott menunjuk pada konteks agraris yang rapuh dan eksploitatif yang pada umumnya merupakan produksi interaksi antara tiga kekuatan yaitu,

perubahan demografis, produksi untuk pasar dan pertumbuhan negara. Potensi eksploitatif dari tiga kekuatan tersebut hanya dapat direalisasikan sepenuhnya di dalam konteks monopoli paksaan. Bagi petani pada konteks Asia Tenggara yang gambarkan oleh Scott di tanah Sedaka, perlawanan para petani berbentuk perlawanan yang sifatnya jangka panjang dengan bentuk perlawanan dengan cara memperlambat pekerjaan, berpura-pura dalam bertindak dan berbicara, menjatuhkan nama baik seseorang, mencuri dan penyabotasean.

Di negara berkembang, petani jarang mau untuk berhadapan langsung dengan pihak penguasa/berwenang terkait permasalahan pajak, teknis pola tanam, dan kebijakan kebijakan yang sifatnya mengikat petani dan memberatkan kehidupan mereka. Petani lebih banyak melakukan melakukan penolakan dengan cara menerima tapi tidak mengaplikasikan dan memperlambat pekerjaan. Cara- cara ini dilakukan tanpa menggunakan wadah organisasi formal dan melakukan penggerakan massa dengan cara gerilya. (<http://dedenmyger.blogspot.com/2010/12> [diakses: 2 Maret 2012]).

Namun – seperti yang diungkapkan Mustain dalam buku Petani Vs Negara dan Priyatmoko – pada perkembangan gerakan petani dan bentuk-bentuk gerakan petani sebelum terjadi reklamasi pada era 97. Ketidak berdayaan dan ketertekanan petani dalam menghadapi kekuatan negara dalam pandangan James Scott sesuai digunakan untuk menggambarkan gerakan petani era tahun 1997

dimana tekanan yang dialami petani tidak diimbangi oleh keterbukaan sistem yang membuat petani enggan untuk melakukan lebih dari bentuk-bentuk perlawanan yang sudah akrab mereka gunakan.

Namun bagaimana dengan kondisi selepas tahun 1997 saat terjadi reklamasi dan petani berpolitik? Salah satu teori dalam gerakan sosial yang dapat menjelaskan adalah *Political Opportunity Structure* atau struktur kesempatan politik. Mekanisme struktur kesempatan politik berupaya menjelaskan sebuah gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai sebuah kesempatan (Situmorang, 2007: 3).

Gerakan terjadi tidak ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan, tapi aksi kolektif berupa revolusi muncul ke permukaan terjadi ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan (Situmorang,

2007: 3). Dengan keadaan terbuka inilah, adaptasi kekuasaan yang lama diubah untuk menjadi sesuatu hal yang baru atau dirubah menjadi berbeda dengan kondisi yang lalu mengakibatkan ketidak seimbangan politik dan juga konflik antar elit. Lembaga kenegaraan yang mulanya memiliki otoritas yang sangat besar dan represif pelan-pelan akan sedikit melunak dan memberikan peluang untuk terjadinya suatu gerakan. Keadaan ini yang kemudian digunakan oleh para penggerak untuk melakukan suatu perubahan.

Sidney Tarrow mengemukakan bahwa gerakan sosial politik tidaklah lahir tanpa peluang yang diciptakan, ketika struktur peluang terbuka terhadap gerakan sosial, gerakan-gerakan tersebut mengalami kebangkitan dan ketika struktur tersebut tertutup, misalnya karena adanya perubahan dalam opini publik yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan ketidak amanan dan kekerasan, maka gerakan-gerakan tersebut menghilang. Peluang tersebut tercipta atas kelengahan negara sebagai mandat masyarakat.

Konteks sosial dari pendapat Tarrow ini adalah sejarah dari gerakan sosial dan mengedepankan teori tindakan kolektif (collective action) untuk menjelaskan kebangkitan dan kemunduran dari gerakan-gerakan. Buku ini juga menawarkan sebuah interpretasi mengenai kekuatan dari gerakan dengan menekankan dampak mereka terhadap kehidupan personal, reformasi kebijakan dan kultur politik.

Tarrow secara spesifik merumuskan empat variabel struktur kesempatan politik akan berlangsung menurut Tarrow adalah: (1) Gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan, (2) ketika keseimbangan politik lama tercerai-berai, tapi keseimbangan politik baru belum terbentuk, (3) ketika para elit politik mengalami konflik besardan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan, (4) ketika para pelaku perubahan digandeng oleh

para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan (Situmorang, 2007: 5).

Empat variabel tersebut merupakan variabel penentu terjadinya gerakan yang memungkinkan untuk kondisi struktur kesempatan politik berlangsung. Namun empat variabel tersebut tidak semuanya akan terjadi dalam satu peristiwa gerakan. Kunci utama dari term kesempatan struktural politik gerakan akibat keterbukaan sistem.

Dalam konteks kehidupan petani, Tarrow menjelaskan bahwa petani tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyalurkan kekecewaan dan kemarahannya sebagai akibat kuat ancaman negara (*opportunity and threat*). Meskipun sangat mungkin petani sudah siap melakukan mobilisasi melalui proses pertanian dan juga mubilisasi struktural (Mustain, 2007: 332). Namun jika terdapat akses untuk naik dan adanya keterbukaan sesuai seperti pada faktor yang diberikan oleh Tarrow, tidaklah tidak mungkin ada kesempatan bagi petani untuk melakukan mobilitas struktural.

Omah Tani dan Perkembangannya

Omah Tani adalah sebuah organisasi pergerakan petani di Kabupaten Batang. Awalnya organisasi tani di Batang ini munculnya diawali dengan pendirian-pendirian Organisasi Tani Lokal (OTL) di beberapa wilayah yang mengalami sengketa tanah dengan pihak perkebunan maupun pihak perhutani. Hingga saat ini total ada 25 OTL yang berdiri dan bergabung dengan Omah Tani. Sebarannya antara lain kecamatan Blado, Bandar, Tulis, Kuripan, Bawang dan Subah. Sengketa antara sekelompok petani yang berada di Desa Kebumen dan Desa Simbang Kec. Tulis – menamakan dirinya OTL Kembang Tani – yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT Ambarawa Maju); sekelompok petani yang berada di Desa Tumbrep kec. Bandar yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) – yang juga berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT. Tratak), dan sekelompok petani di wilayah Pagilaran yang- menamakan dirinya Paguyuban Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP) yang berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara pemegang HGU,

yakni PT Pagilaran. Dalam perkembangan selanjutnya hingga tahun 2006, Omah Tani beranggotakan 14 OTL.

Walaupun wilayah operasi Omah Tani tidak mencakup seluruh daerah yang ada di Kabupaten Batang, namun gerakannya telah membuat organisasi gerakan sosial ini memiliki pengaruh politik yang cukup kuat di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah, khususnya daerah sekitar Kendal-Batang-Pekalongan. Tidak lama setelah dideklarasikan pada tahun 2000, hanya dalam kurun waktu dua tahun tepatnya antara tahun 2002 sampai 2004, beberapa kelompok petani lainnya menyatakan diri untuk turut bergabung. Mereka adalah Paguyuban Petani Sidadi (P2SD) yang berada di Kecamatan Tulis, Petani Sido Makmur (PSM) yang berada di kec. Bawang Petani Maju Kurang Tanah (PMKT) yang berada di kec. Bawang, serta Paguyuban Petani Sido Mulyo (P2SM) yang berada di Kec. Gringsing.

Kerja pengorganisasian serta strategi pembelaan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Omah Tani membuat organisasi ini tidak hanya dikenal oleh petani-petani di Kab. Batang. Sejumlah -petani yang berasal dari kabupaten Pekalongan pun berminat untuk bergabung. Minat untuk bergabung juga tidak hanya datang dari kelompok petani, melainkan juga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari pesisir pantai utara kabupaten Pekalongan dan Batang yang bermasalah dengan kegiatan utama mereka untuk mencari ikan. Karena itu, pada Rembug Tani tahun 2003, terjadi penambahan anggota yang berasal dari Kab. Pekalongan serta tidak hanya dari kelompok petani, juga kelompok nelayan. Untuk itu, format keorganisasian diubah menjadi Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP). Demikian seterusnya hingga keanggotaan FP2NBP terus bertambah mencapai 18 OTL (15 OTL di Kab. Batang dan 3 OTL di Kab. Pekalongan) pada tahun 2003. Tetapi melalui Rembug Tani pada tahun

2007 kembali diputuskan pemisahan diantara kedua kabupaten tadi untuk mengefektifkan kerja-kerja pengorganisasiannya; namanya kembali menjadi FPPB (Forum Perjuangan Petani Batang) untuk kelompok gerakan yang berada di Kab. Batang, dan kelompok gerakan yang berasal dari Kab. Pekalongan menamakan

dirinya Forum Perjuangan Petani Pekalongan (FPPK). Tapi pada tahun 2009 tepatnya saat pemilu, FPPB merubah namanya menjadi Omah Tani dengan dasar agar lebih familiar dan juga permasalahan perpecahan anggota. Keberadaan Omah Tani juga sangat terkait dengan keterlibatan seorang pengacara independen yang tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, bernama Handoko Wibowo. Perannya cukup besar untuk memperkuat keberadaan Omah Tani, karena dengan profesinya sebagai pengacara, ia dapat memberi jasa bantuan hukum bagi sejumlah petani yang berhadapan dengan permasalahan perdata dan pidana, khususnya dalam proses-proses penyelesaian hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan jaringan yang dimiliki oleh Handoko, Omah Tani kemudian bisa melakukan kampanye secara nasional, misalnya dengan salah satu lembaga yang berkedudukan di Jakarta, yaitu Demos, sebuah lembaga kajian isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Handoko menjadi salah satu simpul dari Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi yang diprakarsai oleh Demos.

Bentuk Gerakan Omah Tani

Bentuk gerakan yang dilakukan oleh Omah Tani selama tahun 2007 hingga 2011 berdasarkan data yang dihimpun baik bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi, dapat dibedakan menjadi 3 pola. Bentuk yang pertama adalah dengan mengakomodir massa dengan jumlah yang besar atau yang dikenal dengan istilah aktivitas determinasi. Bentuk yang kedua adalah melakukan upaya hukum dan audiensi baik dengan kepolisian, kejaksaan dan juga anggota legislatif daerah. Dan bentuk yang terakhir yaitu dengan cara perebutan kekuasaan. Ketiga hal tersebut tentunya memiliki pendasaran yang kuat dan tentu saja memiliki bukti rekam.

Bentuk yang pertama dengan cara mengakomodir massa dengan jumlah yang besar atau yang dikenal dengan istilah aktivitas determinasi, atau kita semua akrab menyebutnya dengan istilah demonstrasi. Dimana akan ada keterlibatan

massa dengan jumlah kuantitas yang besar untuk memprotes atau mendukung sesuatu. Dalam melakukan aksinya, organisasi ini biasanya melakukan lima bentuk aksi, yaitu

aksi demonstrasi untuk menuntut, aksi damai, aksi solidaritas, aksi terkait perayaan dan aksi bentrokan langsung.

Aksi dengan sifat untuk menuntut dapat dilihat dari aksi yang dilakukan Omah Tani untuk pencabutan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dimana Omah Tani mengerahkan lima belas ribu massa di depan Gedung DPRD Batang (Warta Pesisir Barat, 19 Juni 2007). Pada tanggal empat Februari tahun 2008, sebanyak sepuluh ribu massa Omah Tani didukung oleh solidaritas petani kendal, Temanggung dan Pekalongan. Aksi ini ditujukan untuk menuntut penyelesaian kasus tanah yang terkesan tidak tersentuh dan belum diselesaikan juga (Suara Merdeka, 5 Februari 2008). Aksi yang sifatnya damai dapat dilihat dari aksi ruwat desa yang dilakukan Omah Tani sebagai media untuk memotivasi para anggota Omah Tani untuk tetap memperjuangkan tanahnya (Suara Merdeka, 1 Desember 2008). Aksi yang sifatnya solidaritas dilakukan oleh Omah Tani ketika terjadi peristiwa seperti bencana dan solidaritas untuk orang-orang tertentu yang biasanya terjerat kasus hukum. Pada saat bencana alam meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2009 yang lalu, Omah Tani yang dibantu Omah Rakyat dan Kejari Batang melakukan aksi pengumpulan bantuan pada 19 November yang lalu (Radar Pekalongan, 21 November 2011). Aksi terkait perayaan biasanya dilakukan Omah Tani untuk merayakan hal yang sifatnya rutin dirayakan setiap tahunnya seperti perayaan ulang tahun Omah Tani, acara kemerdekaan RI, dan lain lain. Pada tahun 2007 tanggal 1 Juni merupakan hari ulang tahun Omah Tani dirayakan selain dengan syukuran juga dilakukan doa bersama untuk kelancaran organisasi sekaligus mendoakan peristiwa tewasnya empat petani di Pasuruan (Suara Merdeka, 2 Juni 2007). Lima puluh tahun hari ulang tahun tani di Indonesia tepatnya pada 24 September 2010 diperingati oleh Omah Tani dengan melakukan aksi teaterikal lumpur di lahan sengketa di Desa Tumbrep (Suara Merdeka, 25

September 2010). Selain merayakan hari-hari penting yang dekat dengan kehidupan petani, Omah Tani juga turut serta turun aksi merayakan hari buruh, Kartini dan HAM. Pada tahun 2008, tepatnya tanggal 1 Mei merupakan *May-day* peringatan hari buruh diperingati

oleh Omah Tani dengan cara demo di sekitar alun-alun

bersama dengan kelompok serikat buruh Batang dan Pekalongan (Suara Merdeka, 2

Mei 2008).

Model pola determinasi ini tentunya merupakan keuntungan pada sisi kuantitas serta didukung oleh banyaknya jumlah massa. Petani yang merupakan massa Omah Tani memiliki kelebihan sebaran massa tersebar di kecamatan Blado, Bandar, Tulis, Kuripan, Banyu Putih, Bawang dan Subah. Pengorganisasian massa tersebut difokusasi oleh tiap-tiap OTL. Jumlah keseluruhan massa Omah Tani adalah 11.050 KK.

Bentuk yang kedua yaitu melakukan upaya hukum dan audiensi dengan berbagai pihak yang terkait. Jalur upaya hukum ini pertama kali dilakukan saat awal pembentukan Omah Tani pada tahun 2000 dimana terjadi bentrokan dan pembakaran rumah milik mandor Perkebunan Tratak dan penangkapan besar-besaran di Pagilaran. Jalur ini merupakan jalur formal yang memang harus dilakukan ketika terjadi tindakan pelanggaran hukum terutama hukum perdata jika dikaitkan dalam konteks kasus tanah.

Tentunya Omah Tani sudah banyak melakukan upaya hukum baik secara formal berhadapan dengan sidang dan bahkan audiensi dengan pihak Kejari dan komisi A DPRD Kabupaten Batang dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan kasus sengketa tanah. Seperti yang termuat dalam media, Omah Tani pernah mendatangi BPN Kabupaten Batang terkait penyelesaian kasus Brontok dan melakukan pemberian data berupa tanda tangan petani korban kasus sengketa (Suara Merdeka, 23 November 2009). Selain dengan BPN, Omah Tani juga pernah mendatangi Kejari Kabupaten Batang dengan aksi damai untuk mengadukan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan Perkebunan Tratak (Seputar Indonesia, 1 April 2008). Lalu audiensi dengan Komisi A DPRD Batang untuk menanyakan dan mengadukan proses petunjuk teknis dalam pencabutan HGU Tratak (Radar Pekalongan, 23 Januari 2008).

Bentuk yang ketiga yaitu dengan cara

perebutan kekuasaan atau dengan melalui jalur politik. Alasan utama Omah Tani melakukan perebutan kekuasaan adalah untuk memuluskan tujuan organisasi. Dengan duduk di kursi kekuasaan dan memegang sistem, merekadengan mudah dapat mengelola dan mempengaruhi kebijakan secara langsung.

Sejalan dengan tingginya figur dan kepercayaan masyarakat, Omah Tani pun merumuskan jalan politiknya sendiri. Diawali pada tahun 2007 dengan mengusung para kader pilihannya untuk maju dalam bursa Kepala Desa di wilayah yang standartnya bakal calon yang sudah siap untuk maju, difigurkan oleh masyarakat di wilayahnya dan wilayah tersebut berpotensi rawan bentrok dengan perusahaan pemegang HGU.

Selain maju dalam bursa pemilihan kepala desa, Omah Tani juga berambisi untuk meletakkan kader-kader terbaiknya sebagai – seperti yang diucapkan oleh Pak Surono dan Pak Handoko – bupati dan duduk di jabatan legislatif daerah. Rencana ini khususnya pada rencana mendudukkan kadernya di bursa calon legislatif akan direalisasikan pada pemilu tahun 2014 dengan target mendudukkan tiga calon. Sedangkan untuk bupati, Omah Tani sebenarnya sudah banyak terlibat dan berperan dalam terpilihnya dua Bupati Batang yaitu Bintoro pada tahun 2006 dan Yoyok pada 2011 yang lalu.

Target Organisasi dan Perkembangannya

Secara umum, target yang dibawa oleh Omah Tani adalah penyelesaian kasus sengketa tanah. Namun dalam perkembangannya selepas tahun 2006, Omah Tani memfokuskan targetnya ke dalam dua kelompok yakni target organisasi dan target politik. Dalam target organisasi, Omah Tani memasukkan fokus penyelesaian tanah sengketa yang belum selesai. Sedangkan dalam target politik, dimasukkan fokus tujuan yang hubungannya dengan gerak politik yang akan dilakukan Omah Tani.

Selama tahun 2007 hingga 2011, permasalahan sengketa tanah yang diperjuangkan Omah Tani – yang dikembangkan dari tahun 2000 – belum selesai juga. Tentunya masih berputar-putar pada empat kasus sengketa tanah dengan Perkebunan Tratak, Sigayam, PTPN IX dan

Pagilaran.

Strategi dalam penyelesaian empat kasus ini Omah Tani menyusun dua tahapan *problem solving*. Yang pertama adalah penempatan kader di posisi strategis. Pendasaran target ini adalah pada Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, khususnya Pasal 6 ayat (2). Di dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan “masyarakat pemegang hak atas tanah” ditafsirkan akan diwakili oleh Kepala Desa yang ada di sekitar lokasi yang akan dikeluarkan izin lokasinya. Pertimbangan ini telah mendorong organisasi tani di Batang kemudian menekankan pentingnya strategi dan kegiatan yang diarahkan pada upaya menguasai posisi kepala desa di sekitar wilayah perkebunan, terutama wilayah di mana terdapat konflik antara masyarakat dengan pengelola perkebunan. Strategi pendudukan kepala desa dilihat sebagai langkah awal atau langkah kecil di dalam upaya yang lebih besar untuk memenangkan sengketa- sengketa tanah dengan pihak perkebunan (Hilma Safitri, 2010: 17).

Yang kedua yaitu penyelesaian hukum dan audiensi dengan pihak terkait. Dalam fokus ilmu hukum, permasalahan tanah merupakan permasalahan hukum perdata. Dimana proses dan penyelesaiannya melibatkan pihak Kejari dan BPN. Dalam gerak hukum, penyelesaian masalah langsung dilakukan oleh divisi kasus yang dipegang langsung oleh Pak Handoko Wibowo. Selain penyelesaian kasus, para petani juga dibekali

Dalam perkembangannya selama tahun 2007 hingga 2011, t a r g e t organisasi yang tercapai adalah penyelesaian kasus Petak 107 di desa antara Perhutani dan OTL Tri Tunggal Sejati yang melibatkan 500KK (Suara Merdeka, 19

September 2007), lalu kasus tanah tepi laut Jawa yang melibatkan PTPN IX dan warga Brontok (Suara Merdeka, 18 November 2009), dan yang terakhir penyelesaian 50% kasus tanah Perkebunan Tratak.

Target utama Omah Tani dalam melakukan gerak politik didasari pandangan bahwa pemimpin yang sifatnya lokal seperti kepala desa, bupati dan anggota DPRD tingkat Kabupaten diyakini oleh Omah Tani dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan utama organisasi yaitu penyelesaian kasus

sengketa tanah. Tentunya pandangan ini juga didasari oleh aturan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, khususnya Pasal 6 ayat 2 yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemimpin daerah yang merupakan wakil masyarakat obyek HGU memiliki kewenangan terhadap Hak Guna Usaha suatu perusahaan di daerah bersangkutan.

Namun dalam perkembangannya selepas tahun 2008 tepatnya setelah sukses dalam Pilkades di beberapa desa di Batang, target politik Omah Tani berkembang tidak hanya untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah saja. Omah

Tani tidak hanya berdiri sendiri, namun juga beberapa organisasi lain termasuk organisasi sayap dari Omah Tani (SITA, Omah Rakyat, Omah Buruh, Omah Perempuan). Sehingga dalam gerak politiknya, tidak hanya menginginkan posisi jabatan publik untuk mempermudah akses untuk mendapatkan tanah tapi juga akses untuk menjangkau jaminan kesejahteraan masyarakat miskin seperti dana jaminan kesehatan, pendidikan, dan bantuan langsung tunai. Seperti yang dikatakan informan di atas, tanah memang memegang peranan penting tapi jaminan kesejahteraan untuk masyarakat miskin juga menjadi utama ketika mereka mampu duduk di jabatan publik.

KESIMPULAN

Pemikiran James Scott dalam *Moral Ekonomi Petani dan Senjata Kaum Tertindas* merupakan referensi yang dapat digunakan dalam mengamati gerakan yang dilakukan petani terutama di Asia Tenggara. Dalam pemikirannya, Scott lebih banyak memberikan perlawanan petani model Asia yang lemah dan kesannya diam. Bagi James Scott, faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu gerakan khususnya perlawanan petani adalah adanya hubungan yang eksploitatif yang dilakukan oleh penguasa, yang mengakibatkan kondisi ekonomi petani lemah. Dalam konteks struktural, Scott menunjuk pada konteks agraris yang rapuh dan eksploitatif yang pada umumnya merupakan produksi interaksi antara tiga kekuatan yaitu, perubahan demografis, produksi untuk pasar dan pertumbuhan negara. Potensi eksploitatif dari tiga kekuatan tersebut hanya dapat direalisasikan sepenuhnya di dalam konteks

monopoli paksaan.

Dalam konteks gerakan petani yang dilakukan oleh petani dalam Omah Tani, eksploitasi yang terjadi lebih diakibatkan oleh adanya tekanan dari penguasa baik dalam bentuk negara dan pemilik modal yang diwujudkan dalam perusahaan perkebunan negara seperti PTPN dan Perhutani, sedangkan pemilik modal adalah para perusahaan perkebunan besar yang menyewa dan bahkan menyerobot tanah milik desa atau tanah negara yang dimaksudkan agar dikelola oleh petani (misalnya tanah yang mislanya hutan masyarakat).

Inti dari strategi perlawanan yang dilakukan petani adalah gerak perlawanan tanpa mengundang konflik yang besar dengan kata lain perlawanan tanpa menonjolkan perlawanan itu sendiri. Jika demikian maka bentuk gerakannya tentunya akan melihat pada upaya-upaya gerilya petani seperti yang sudah disebutkan oleh Scott seperti dengan cara memperlambat pekerjaan, berpura-pura dalam bertindak dan berbicara, menjatuhkan nama baik seseorang, mencuri dan penyabotasean.

Bentuk perlawanan tersebut jika dihadapkan dengan gerakan yang dilakukan oleh Omah Tani yang melakukan aksi massa dengan kuantitas yang besar, menargetkan posisi publik sebagai target politiknya, tentunya hal ini merupakan suatu perkembangan dari gerakan petani. Walaupun strategi perlawanannya bukan bertujuan mengundang konflik yang yang besar ditunjukkan dengan target politik yang bisa jadi untuk menyiasati gerakan yang sifatnya hanya kuantitas dan buang-buang energi dengan bermain cantik melalui jabatan publik yang sudah diraih. Kepala desa misalnya yang sudah terpilih sejumlah delapan orang yang masih idealis dan mengondisikan perjuangan di desanya masing-masing.

Di dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia, Scott mengatakan bahwa petani jarang mau untuk berhadapan langsung dengan pihak penguasa/berwenang terkait permasalahan pajak, teknis pola tanam, dan kebijakan kebijakan yang sifatnya mengikat petani dan memberatkan kehidupan mereka. Cara-cara ini dilakukan tanpa menggunakan wadah organisasi formal dan melakukan penggerakan massa dengan cara gerilya.

Dalam konteks kehidupan petani di Batang khususnya para petani yang tergabung dalam Omah Tani ditunjukkan nilai penting berorganisasi secara formal. Nilai penting yang mereka pegang adalah dengan berorganisasi maka akan ada sebuah ikatan layaknya saudara dan akan timbul rasa saling membantu. Dengan begitu petani tidak lagi memperjuangkan masalah tanah sendiri-sendiri, tapi terpusat dalam Omah Tani. Penentangan budaya diam petani dalam menghadapi permasalahan pajak, teknis pola tanam, dan kebijakan yang sifatnya mengikat petani dan memberatkan kehidupan mereka juga tidak lagi dengan cara gerilya namun berhadapan langsung dengan menggunakan cara aksi massa yang sifatnya menentang kebijakan, audiensi hukum dengan pihak-pihak terkait bahkan merundingkan potensi pajak itu sendiri.

Dengan kata lain, konteks gerakan petani yang dialami oleh petani Omah Tani Batang dan konteks yang dikemukakan Scott dalam dua bukunya mengalami perubahan dimana petani mulai berani untuk bergerak secara terang-terangan bahkan berpolitik untuk mendapatkan akses dan penyelesaian masalah yang dialami oleh para petani tersebut. Meninggalkan kebiasaan perlawanan dalam diam petani dan berhadapan langsung dengan pihak berwenang bahkan mampu meyakinkan ketidaksetujuan terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasaan yang memberatkan kehidupan mereka.

Akhir kekuasaan Orde Baru di Indonesia merupakan sebuah tanda perubahan sosial dan politik. Dimana membawa kesempatan bagi semua orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melakukan perubahan dengan cara melakukan gerakan sosial dan politik sebagai sebuah proses mendapatkan kesempatan politik. Tak terkecuali kelompok petani seperti Omah Tani. Dalam gerakan sosial salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan gerakan sosial-politik yang ditandai dengan adanya perubahan struktur politik adalah *Political Opportunity Structure* atau struktur kesempatan politik. Mekanisme struktur kesempatan politik berupaya menjelaskan sebuah gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai sebuah kesempatan.

Aksi sosial terjadi tidak ketika kelompok

masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan, tapi aksi kolektif berupa revolusi muncul ke permukaan terjadi ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. Dalam pandangan Tarrow, ada empat variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya struktur kesempatan politik adalah:

1. Gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan
2. Ketika keseimbangan politik lama tercerai-berai, tapi keseimbangan politik baru belum terbentuk
3. Ketika para elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan
4. Ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.

Variabel di atas merupakan variabel penentu terjadinya gerakan yang memungkinkan untuk kondisi struktur kesempatan politik berlangsung. Tapi empat variabel tersebut tidak semuanya akan terjadi dalam satu peristiwa gerakan. Namun kata kunci utama dari pendekatan kesempatan struktural politik gerakan akibat adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang untuk masuk.

Dalam konteks kehidupan petani, Tarrow menjelaskan bahwa petani tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyalurkan kekecewaan dan kemarahannya sebagai akibat kuat ancaman negara (*opportunity and threat*). Meskipun sangat mungkin petani sudah siap melakukan mobilisasi melalui melalui proses pertanian dan juga mobilisasi struktural. Namun jika terdapat akses untuk naik dan adanya keterbukaan sesuai seperti pada faktor yang diberikan oleh Tarrow, tidaklah tidak mungkin ada kesempatan bagi petani untuk melakukan mobilitas struktural.

Kembali lagi pada konteks gerakan petani yang dilakukan oleh Omah Tani di Batang. Adanya keinginan untuk melakukan pergerakan sosial-politik dan maju dalam kontestasi politik lokal lebih diakibatkan oleh keterbukaan yang terjadi selepas masa berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Hal ini ditandai dengan tidak adanya upaya represif penguasa melalui aparat seperti polisi dan tentara yang mampu menekan gerakan tani dengan represif. Melemahnya lembaga negara tersebut memberikan peluang bagi para petani

di Batang untuk berani melakukan pergerakan.

Upaya nyata yang dilakukan oleh Omah Tani dalam mempergunakan kesempatan politik yang ada untuk masuk dalam ranah struktural ditandai dengan adanya gerakan dan rencana politik yang telah disiapkan melalui target gerak politik lokal. Runtutan rencana gerak politik yang dilakukan oleh Omah Tani diawali dengan mencoba berkompetisi melalui Pilkades. Hasilnya dari sepuluh calon yang diajukan, sembilan terpilih sebagai kades. Meskipun hanya delapan diantaranya yang masih idealis untuk tetap melakukan gerakan dalam Omah Tani.

Dalam hal variabel “para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan”, tentunya hal ini juga dialami oleh Omah Tani. Kuantitas massa anggota Omah Tani yang mencapai angka puluhan ribu merupakan kesempatan kemenangan yang besar bagi para

kontestan dalam pemilu daerah baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Dua kali pemilukada yang dilakukan di Kabupaten Batang dengan calon yang berbeda nyatanya keduanya terpilih dan menang dalam kompetisi politik. Dan dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah, strategi menggandeng Omah Tani beserta massanya yang kala itu tidak hanya di Batang tapi juga di Pekalongan membawa kemenangan yang manis bagi Gubernur Jateng terpilih. Tentunya Omah Tani mau diajak bekerja sama dengan ikatan kontrak politik pemenuhan kepentingan bagi petani ketika calon tersebut terpilih.

DAFTAR RUJUKAN

- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Landsberger, Henry dan Yu Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Kamajaya, Rizza. 2010. *Transformasi Strategi Gerakan Petani, dari Gerakan Bawah Tanah menuju Gerakan Formal*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government.
- Mustain. 2007. *Petani Vs Negara, Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Scott, James C.. 2000. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah, Bentuk Perlawanan Seharian-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 1981. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amakia, Erick Evodius. 2011. *Pemekaran Kabupaten Adonara – Nusa Tenggara Timur : Studi Tentang Gerakan Sosial Politik Masyarakat Daerah*.
- Dito Ramadhan. 2011. *Artikulasi Kepentingan Petani: Peran dan Fungsi HKTI Jawa Timur Sebagai Organisasi Petani di Jawa Timur*.
- Safitri, Hilma. 2010. *Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Syamsudin. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*. Jurnal Hukum no. 3 vol.14 juli 2007: 458 - 473
- “HUT ke-9 Forum Petani Batang, Digelar Selamat”. *Suara Merdeka*, 2 Juni 2007.
- “Ribuan Petani Menggugat”. *Warta Pesisir Barat*, 19 Juni 2007.
- “Sengketa Hutan Petak 107 Berakhir”. *Suara Merdeka*, 19 September 2007.
- “FPPB Pertanyakan Penyelesaian Kasus Tanah”. *Radar Pekalongan*, 23 Januari 2008.
- “10 Ribu Petani Pagi ini Datangi Kantor Bupati”. *Suara Merdeka*, 5 Februari 2008.

“Diintimidadi LSM, Petani Geruduk Kejari”.
Seputar Indonesia, 1 April 2008.

“Ruwatan Petani Batang”. *Suara Merdeka*, 1
Desember 2008.

“144 KK Tunggu Sertifikasi Lahan di Brontok”.
Suara Merdeka, 18 November
2009.

“Ribuan Petani Galang tanda Tangan”. *Suara
Merdeka*, 23 November 2009.

“Kasus Konflik Tanah Diminta Selesaikan”.
Suara Merdeka, 25 September 2010.